

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awal abad ke-20 penulisan sejarah yang berhubungan dengan perkotaan mulai menjadi tema menarik bagi sebagian peneliti sejarah. Namun, bagi sebagian peneliti hal tersebut masih tergolong baru dan berbeda dari penulisan sejarah yang biasanya. Mungkin saja faktor keterikatan pada pandangan terdahulu masih membayangi bagi sebagian peneliti sejarah, bahwa sejarah hanya berputar pada peristiwa besar, mencolok, atau bercerita tentang orang-orang besar atau sering disebut sejarah konvensional. Kuntowijoyo yang menganggap hal ini disebabkan kurangnya rasa kepercayaan terhadap kekayaan dan kemungkinannya, padahal di awal abad ke-20 kota-kota di Indonesia sudah mengambil alih banyak kegiatan dari pedesaan.¹ Kesadaran peneliti sejarah dalam melihat fenomena yang terjadi di perkotaan, mendorong semakin banyaknya penulisan sejarah terkait hal tersebut. Permasalahan kontemporer terkait masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terjadi di perkotaan menarik minat para peneliti sejarah untuk mengkaji lebih dalam guna menjawab berbagai permasalahan perkotaan.

Pada perkembangannya, kota menjadi sebuah entitas baru yang melahirkan berbagai macam interaksi dan kejadian yang membawa pada sebuah perubahan dalam masyarakat. Dalam konteks sebuah kajian ilmiah, di semua jenis penulisan,

¹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 59.

kota hanyalah merupakan lokasi bagi kajian yang bermacam-macam. Jika semua yang mengenai kota, orang kota, kejadian di kota, dapat menjadi bidang sejarah kota, kiranya semua hal termasuk di dalamnya.² Dalam perkembangan perkotaan di Indonesia, gejala yang muncul nampaknya hampir seragam walaupun tidak semua berkembang pada tingkatan yang sama. Seperti munculnya kota-kota prakolonial atau biasa disebut kota tradisional³, sebagai cikal bakal kota-kota saat ini, serta adanya pengaruh kolonial sebagai kekuatan ekstern yang merubah dan membentuk pola tata ruang perkotaan.

Memperhatikan gejala perkembangan kota-kota di Indonesia, penulis kemudian mengarahkan perhatian pada salah satu kota yang berada di ujung utara jazirah pulau Sulawesi, yaitu Kota Gorontalo. Kota ini merupakan kota pesisir yang letaknya berada di delta yang terbentuk dari Sungai Bone dan Sungai Bolango. Berada dalam cekungan teluk yang dibentengi oleh bukit-bukit tinggi yang memanjang dari Timur ke Barat. Letaknya strategis berada di tepian Teluk Tomini, dengan akses ke jalur perdagangan laut yang penting di masa lalu.

² Ilham Daeng Makkelo, "Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis", *Lensa Budaya*, Vol. 12, No. 2, (Oktober 2017), hlm. 84.

³ Secara harfiah kota tradisional dapat diartikan sebagai pusat-pusat kerajaan awal atau ibukota kerajaan di nusantara hingga datangnya pengaruh kolonial. (*ibid.*, hlm. 86); Konsep kota tradisional di Indonesia adalah konsep kota yang berakar pada peradaban agraris yang bersifat despotik (otoriter) dan tertutup (baca Jo Santoso, *Menyiasati Kota tanpa Warga*, (Jakarta: Penerbit KPG dan Centropolis, 2006), hlm. 82). Konsep kota tradisional sering disamakan dengan kota praindustri atau kota feodal, yaitu kota-kota yang dibangun dan berkembang sebelum industrialisasi pada abad ke-19 (Tawalinuddin Haris, *Kota dan Masyarakat Jakarta dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial Abad XVI-XVIII*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2007), hlm. 6.

Kota Gorontalo merupakan kota yang berkembang tidak jauh berbeda dengan kebanyakan kota-kota di Indonesia. Kota ini mengalami fase perkembangan kota yang umum terjadi yang diawali dari sebuah kota tradisional dan berkembang dalam pengaruh kekuasaan kolonial. Lahir dan berkembangnya Kota Gorontalo sebagai sebuah kota tidak terlepas dari dua momen bersejarah. Momen-momen ini memberi pengaruh besar terhadap terbentuknya satuan ruang kota yang dinamis. Momen pertama adalah masuknya pengaruh kolonial di Gorontalo. Sejak akhir abad ke-17, pengaruh perluasan teritorial oleh VOC telah mencapai Kerajaan Gorontalo. Melalui kontrak politik yang dilakukan antara raja-raja dan VOC membuka hubungan baru antara keduanya.⁴ Di satu sisi, hubungan ini bagi Kerajaan Gorontalo sebagai akibat dari permintaan mereka untuk dapat terbebas dari pengaruh Ternate. Di sisi lain, hubungan ini membuka jalan bagi VOC untuk dapat memperluas wilayah ekspansinya.

Momen kedua terjadi pada saat pemindahan ibukota Kerajaan Gorontalo ke wilayah sekitar teluk Gorontalo pada pertengahan abad ke-18. Pemindahan ini terjadi pada masa Raja Botutihe⁵. Di ibukota yang baru, Botutihe mulai

⁴ Kontrak politik pertama antara Kerajaan Gorontalo dan VOC terjadi pada tahun 1677. Baca *Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum, Derde Deel*, (1676-1691).

⁵ Botutihe dikenal memiliki jasa bagi masyarakat Gorontalo karena berhasil membangun bandar (kota) Gorontalo sebagai pusat kerajaan menurut suatu perencanaan kota yang matang. Botutihe juga dikenal karena memiliki kecerdasan dan gagasan yang luar biasa. Untuk itu ia diberi gelar *Ilomata* karena jasa dan karyanya yang luar biasa, yang di ingat sepanjang masa (Yayasan 23 Januari 1942, *Perjuangan Rakyat di Daerah Gorontalo Menentang Kolonialisme dan Mempertahankan Negara Proklamasi*, (Jakarta: Yayasan 23 Januari 1942, 1982), hlm. 18-20).

mengembangkan kota baru dengan membangun pusat pemerintahan kerajaan yang berpusat pada istana kerajaan, membangun pemukiman bagi para pembesar, balai permusyawaratan, masjid, jalan, pasar, kompleks pekuburan, dan saluran irigasi.⁶

Selama abad ke-19 pemerintah Belanda telah mempersiapkan Kota Gorontalo sebagai pusat administratif kolonial. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai pembangunan infrastruktur kota dilakukan untuk memenuhi dan kepentingan administratif dan kontrol kolonial. Pembangunan ini mencakup fasilitas militer seperti benteng, kediaman pejabat kolonial, kantor pemerintahan, hingga pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan transportasi. Penerapan sistem pemerintahan langsung oleh pemerintah Belanda di Kerajaan Gorontalo menjadi bagian penting dalam mendorong berbagai pembangunan di Kota Gorontalo.⁷

Perkembangan Kota Gorontalo abad ke-18 hingga ke-20 menghadirkan persimpangan yang menarik antara struktur kota kerajaan dan perencanaan kota kolonial. Kerajaan maupun kolonial masing-masing memperlihatkan pola khas

⁶ Irfanuddin Wahid Marzuki, *Arkeologi Perkotaan Gorontalo Perkembangan Kota dan Sebaran Bangunan Indis di Kota Gorontalo*, (Bali: Pustaka Larasan, 2020), hlm. 27.

⁷ Pemerintahan langsung yang diterapkan Belanda merupakan bentuk kontrol kolonial yang menggantikan sistem pemerintahan tradisional kerajaan lokal. Pada abad ke-19, setelah memperkuat dominasinya di Sulawesi, pemerintah kolonial Belanda secara bertahap menghapus kekuasaan tradisional raja-raja di Gorontalo dan menggantinya dengan struktur pemerintahan yang dikelola langsung oleh pejabat-pejabat kolonial. B. J. Haga, *Lima-Pahalaa: Susunan Masyarakat, Hukum adat dan Kebijaksanaan Pemerintahan di Gorontalo*, (Jakarta: Djambatan, 1981), hlm.8.

dalam menciptakan sebuah konsentrasi hunian berdasarkan pada kemampuan masing-masing pihak dalam mengelola sebuah ruang. Periode ini menyajikan studi kasus yang menarik dalam dinamika transformasi spasial, yang menekankan pada peran penting aspek fisik kota seperti bangunan dalam memahami dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi pada suatu masa tertentu. Selain itu, dalam mengkaji perkembangan ruang perkotaan, penting untuk mempertimbangkan bagaimana faktor sosial seperti migrasi, pergeseran demografi, dan keterlibatan masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk ruang kota. Oleh karena itu, memahami dualitas antara periode kerajaan dan kolonial menjadi penting, untuk memberi pemahaman melalui dinamika ruang atas perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang membentuk Kota Gorontalo.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada dinamika ruang Kota Gorontalo pada periode kerajaan dan kolonial. Dinamika ruang kota tidak hanya menyangkut perubahan bentuk fisik ruang kota maupun penggunaannya, namun relasi yang menghubungkan manusia sebagai pengguna ruang menjadi faktor penentu dalam perubahan tersebut. Untuk itu ada tiga pokok utama yang menjadi bahasan dalam menjawab permasalahan yang diajukan yaitu:

1. Bagaimana proses pembentukan dan konstruksi ruang Kota Gorontalo pada abad ke-18 sampai abad ke-20?
2. Bagaimana perubahan demografi mempengaruhi pembentukan kawasan etnis di Kota Gorontalo?

3. Bagaimana aspek fisik kota, khususnya bangunan berperan penting dalam mencerminkan berbagai dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi pada masyarakat Kota Gorontalo?

Penelitian ini memiliki batasan-batasan untuk memperjelas cakupan studi. Batasan pertama yaitu batasan spasial, batasan ini mencakup ruang lingkup penelitian yang fokus pada wilayah Kota Gorontalo. Sedangkan batasan lainnya yaitu batasan temporal, batasan ini mencakup periode penelitian yang dimulai dari abad ke-18 sampai ke-20. Abad ke-18 menjadi patokan awal dari penelitian ini karena merupakan periode terbentuknya Kota Gorontalo sebagai ibukota kerajaan. Sedangkan abad ke-20 menjadi batasan akhir penelitian karena merupakan akhir dari periode Pemerintahan Kolonial Belanda di Kota Gorontalo. Secara garis besar batasan temporal di atas tidak bersifat mengikat, sehingga pembahasan studi ini dapat maju dan mundur melewati batas waktu yang ditetapkan.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan dan manfaat yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas. Berikut beberapa tujuan tersebut:

1. Menjelaskan secara kronologis proses terbentuknya Kota Gorontalo, serta konstruksi ruang Kota Gorontalo pada abad ke-18.
2. Menjelaskan gejala perubahan demografis mempengaruhi terbentuknya pemukiman etnis di Kota Gorontalo.
3. Menjelaskan peran bangunan dalam mencerminkan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Kota Gorontalo.

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran tentang sejarah kota di Indonesia khususnya terkait pengetahuan tentang perkembangan Kota Gorontalo. Membantu dalam memahami karakter ruang kota Gorontalo yang dapat digunakan dalam pengelolaan dan penataan kota serta untuk memperkuat karakter bangsa.

1.4. Tinjauan Pustaka

Mengikuti perkembangan ilmu sejarah dewasa ini, penulisan sejarah kota banyak diarahkan pada penulisan sejarah dalam menyelesaikan persoalan kontemporer yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, pendekatan yang digunakan lebih kepada pendekatan pada aspek sosial, politik, ekonomi serta budaya maupun pendekatan lainnya yang saling berkaitan. Begitu banyak penelitian tentang sejarah kota telah dikaji oleh pakar-pakar sejarah, arkeolog, arsitektur, budayawan, dan sosiolog, serta pakar-pakar lainnya. Kebanyakan dari kajian ini cenderung tentang kota-kota yang ada di Jawa dan Sumatera. Hal ini memperlihatkan tingkat perkembangan kajian sejarah kota masih di sekitar kota-kota besar yang ada di Indonesia. Meski demikian, kajian-kajian tersebut setidaknya akan sangat membantu dalam membangun kerangka konseptual dan teoritis dalam melihat gejala perkotaan yang ada.

Penulisan tentang sejarah kota cenderung memusatkan perhatiannya pada aspek sosial, ekonomi, kultural, administratif, dan spasial (ruang) dari sebuah kota. Tidak sedikit peneliti yang telah menjadikan kota sebagai topik utama dalam penelitiannya. F. de Haan, seorang yang dianggap sebagai pelopor penulisan kajian tentang kota di Indonesia, melalui tulisannya tentang sejarah Batavia di

abad ke- 19, mengantarnya pada sebuah kajian kota yang mendalam dengan menyajikan informasi-informasi mengenai peristiwa-peristiwa politik, bangunan-bangunan, industri gula, kelompok etnis, kehidupan sehari-hari, pemerintahan, kebersihan lingkungan, dan perdagangan.⁸

Berbagai referensi tentang sejarah kota yang digunakan dalam tulisan ini merujuk pada beberapa karya. Buku *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia* yang di editor oleh Freek Colombijn dan kawan-kawan. Buku merupakan salah satu hasil dari perhatian sejumlah peneliti yang memiliki ketertarikan pada sejarah kota. Berbagai tulisan yang terdapat dalam buku tersebut mengambil berbagai latar tempat dan aspek kajian yang semuanya berada dalam lingkup perkotaan. Salah satu tulisan yang menarik tentang penggunaan ruang kota adalah tulisan dari Dias Pradadimara tentang Kota Makassar. Kisah Makassar yang dijelaskan dalam tulisannya menyingkap bahwa ruang kota tidak terjadi secara alamiah. Ada berbagai proses historis dan intervensi lembaga-lembaga kekuasaan yang membentuk wajah kota. Namun tidak sepenuhnya penguasa dapat mengendalikan dan membentuk wajah kota disebabkan adanya faktor di luar penguasa yang tidak dapat dikendalikan.

Penelitian tentang kota di Indonesia juga dilakukan Peter J.M. Nas (2007), dalam tulisannya tentang kota-kota di Indonesia, Nas menekankan bahwa perkembangan kota-kota di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengaruh lokal, kolonial, dan modernisasi. Kota tumbuh dan berkembang dari

⁸ Freek Colombijn, *Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm. 6.

kebutuhan masyarakat untuk menciptakan ruang yang tidak hanya fungsional tetapi juga simbolis, mencerminkan struktur sosial, nilai budaya, dan hierarki kekuasaan yang ada di dalamnya.

Penggambaran sejarah kota oleh Freek Colombijn dalam bukunya *Paco-Paco (Kota) Padang* juga memusatkan perhatiannya pada persoalan ruang perkotaan. Mengkaji perubahan-perubahan pada penggunaan ruang di Kota Padang selama abad ke-20. Pusat perhatiannya bukan hanya pada penggunaan ruang, namun lebih kepada proses dimana penduduk membentuk kota melalui pemakaian lahan-lahan tertentu. Ruang terbatas dan permintaan melebihi persediaan yang ada yang berujung pada terjadinya konflik.

Hans-Dieter Evers, *Simbolisme Perkotaan di Indonesia: Kasus Padang "Kota Tercinta"*, sebuah penelitian yang mengkaji pemaknaan simbolik terhadap bangunan-bangunan yang ada di Kota Padang. Hans mencoba membaca makna dari setiap bangunan berdasarkan simbol yang melekat pada bangunan yang dipengaruhi oleh berbagai unsur seperti agama, adat, nasionalisme dan yang bersifat modern. Gedung-gedung yang hadir dan tercipta dari proses nilai-nilai yang dikembangkan masyarakat memiliki makna tersendiri bagi penduduk kota. Gedung menjadi lambang yang mentransmisikan tanda-tanda yang sangat kuat ke penduduk kota, seperti masjid akan mengingatkan pada dunia islam beserta nilai-nilai religiusnya, bank menunjukkan bahwa rasionalitas ekonomi dan modernisasi telah kuat ditetapkan, atap rumah yang ada di setiap bangunan yang menggabungkan budaya tradisional Minangkabau, dan pasar yang melukiskan

urbanisme, kehidupan, aktivitas dan berbagai macam dunia komoditi termasuk makna budayanya.

Beberapa penelitian terkait Kota Gorontalo pada masa kerajaan dan kolonial pada dasarnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Namun, tidak banyak penelitian yang membahas Kota Gorontalo secara khusus dan mendalam, terutama yang berfokus pada sejarah perkembangan ruang Kota Gorontalo.

Beberapa tulisan yang dapat digunakan dalam melihat lintasan sejarah dan dinamika masyarakat Gorontalo dapat ditemui dalam tulisan Hasanuddin dan Basri Amin (2012), *Gorontalo dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial*, dalam tulisannya mereka merekonstruksi masa lalu masyarakat Gorontalo dengan mengkaji berbagai aspek seperti politik, sosial, ekonomi, tradisi, dan budaya terutama pada masa kolonial yang dianggap sangat memberi pengaruh besar dalam sejarah lokal Gorontalo.

Tulisan lain dari Hasanuddin, *Pelayaran dan Perdagangan Gorontalo Abad ke-18 dan 19*, memberikan gambaran tentang peran Gorontalo dalam perdagangan dan pelayaran masa kolonial. Gorontalo menjadi pusat perdagangan dan bandar niaga yang penting dalam jalur perdagangan di teluk Tomini yang berdampak pada pembangunan kota Gorontalo sebagai pusat kekuasaan kolonial yang memicu berbagai pertumbuhan dalam masyarakat. Pada bab-bab terakhir buku ini memperlihatkan keadaan Kota Gorontalo masa kolonial dengan menunjukkan letak-letak dari bangunan-bangunan strategis yang dimiliki Pemerintah Belanda.

Sebuah karya penting khusus menggambarkan tentang dinamika kerajaan-kerajaan di Gorontalo, terutama pada masa Belanda, dengan mendalam telah

dikaji oleh Harto Juwono & Yosephine Hutagalung dalam tulisannya *Limo Lo Pohalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo*. Dinamika politik, sosial, ekonomi di antara kerajaan-kerajaan yang ada di Gorontalo dijelaskan secara objektif melalui kajian arsip-arsip kolonial. Tulisan ini memberi banyak informasi penting mengenai keadaan sosial dan politik Kerajaan Gorontalo dari awal hingga berakhirnya masa kerajaan. Terutama dalam kaitannya dengan dinamika kekuasaan dan intervensi kolonial terhadap Kerajaan Gorontalo.

Karya Joni Apriyanto, *Sejarah Gorontalo Modern dari Hegemoni Kolonial ke Provinsi*, menguraikan dinamika masyarakat Gorontalo dari masa kolonial hingga masa terbentuknya Provinsi Gorontalo. Secara faktual menelaah konfrontasi antara rakyat dan pemerintah kolonial, menelaah tindakan-tindakan besar yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok, serta membangun pemahaman tentang sejarah lokal Gorontalo. Tulisan ini menunjukkan berbagai peristiwa penting yang memiliki keterkaitan dengan ruang Kota Gorontalo.

Fendi Adiatmono (2014) menulis sebuah buku tentang Gorontalo yaitu *Weeskamer* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Balai Harta Peninggalan. Buku ini mengkaji persebaran bentuk, motif, tema, dan penerapan pada ornamen rumah tradisional di Gorontalo tahun 1890-2001. Mengulas dan menggali pemaknaan sosial berdasarkan ornamen-ornamen yang melekat pada rumah tradisional yang ada di Gorontalo sebagai tuntunan dan tatanan sosial masyarakat Gorontalo. Perembesan ornamen rumah tradisional yang berkembang di Gorontalo juga tidak lepas dari para pendatang seperti Cina, Belanda, dan Arab.

Hal ini memperlihatkan wujud akulturasi budaya yang harmonis atas penerimaan masyarakat lokal Gorontalo terhadap budaya luar.

David Henley (2005), *Fertility, Food And Fever Population, Economy And Environment In North And Central Sulawesi, 1600-1930*, tulisan Henley membahas hubungan kompleks antara dinamika populasi, ekonomi, dan lingkungan di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah dari perspektif sejarah lingkungan. Salah satu wilayah yang menjadi fokus pembahasan Henley adalah Gorontalo. Henley mengeksplorasi bagaimana tingkat kesuburan (*fertility*), ketersediaan makanan, dan penyakit (*fever*) mempengaruhi perkembangan populasi dan lingkungan di wilayah tersebut.

Secara khusus perkembangan kota Gorontalo yang memperlihatkan morfologi kota dan bangunan kolonial di Kota Gorontalo dikaji oleh Irfan Wahid Marzuki (2020) melalui bukunya, *Arkeologi Perkotaan Gorontalo: Perkembangan Kota dan Sebaran Bangunan Indis di Gorontalo*, tulisan ini menjadi salah satu rujukan dalam penelitian ini, karena dinamika ruang kota Gorontalo dibahas secara khusus serta memberikan gambaran mengenai tinggalan arkeologi berupa bangunan kolonial yang ada di Gorontalo. Melalui pendekatan arkeologis, Irfan mengeksplorasi bagaimana interaksi antara kebudayaan lokal dan kolonial Belanda membentuk ruang dan lanskap perkotaan Gorontalo, dan menyoroti proses transformasi ruang kota yang terjadi selama masa periode kerajaan, islam, dan kolonial, termasuk sebaran bangunan-bangunan penting yang

memperlihatkan pengaruh arsitektur Indis.⁹ Jika Irfan membahas perkembangan Kota Gorontalo dalam perspektif arkeologi, maka dalam penelitian ini mengkaji perkembangan Kota Gorontalo dalam perspektif sejarah

Penelitian ini juga berupaya mempelajari dokumen-dokumen, arsip-arsip serta buku-buku terdahulu yang berhubungan erat dengan penelitian yang telah dilakukan terkait Kota Gorontalo. Beberapa tulisan yang telah dikumpulkan seperti tulisan dari B.J.Haga (1931), *De Lima-pahalaä (Gorontalo): Volksordening, adatrecht en bestuurpolitiek* (Lima pahalaä: Susunan masyarakat, hukum adat dan kebijaksanaan pemerintahan di Gorontalo) merupakan tulisan dari hasil perjalanan dinas ke Gorontalo, mengkaji tentang susunan dan peran hukum adat pada masyarakat di lima kerajaan di Gorontalo. Tulisan selanjutnya dari J Bastiaans (1939), *Batato's in het oude Gorontalo, in verband met den Gorontaleeschen staatsbouw*, merupakan tulisan pertama yang membahas tentang Kota Gorontalo dengan fokus penelitian terkait perkembangan pemukiman perubahan struktur sosial dalam masyarakat. Laporan C.B.H. von Rosenberg (1865), *Reistogten in de afdeeling Gorontalo, gedaen op last der Nederlandsch Indische regering*, menulis tentang topografi, lanskap, sejarah masyarakat serta flora dan fauna di Kerajaan Gorontalo dan Limboto. Begitu pula laporan G. J. F. Riedel (1870), *Het landschappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo en*

⁹ Istilah arsitektur Indis merujuk pada bentuk bangunan. Mengikuti sebutan yang digunakan untuk mengidentifikasi kebudayaan Indis, yaitu suatu wujud kebudayaan yang muncul sebagai percampuran antara kebudayaan lokal di Indonesia dengan kebudayaan Eropa. Edi Sedyawati, Pengkajian dan Pemanfaatan Peninggalan Arkeologi Masa Kolonial, dalam V. Agus Sulistya, Gunawan Haji, dan Suryanto Pamuji, *Buku Informasi Museum tentang Bangunan-Bangunan Indis*, (Yogyakarta: Museum Benteng Yogyakarta, 2001), hlm. 3.

Katinggola of Andagile, tidak jauh berbeda dari tulisan Rosenberg membahas lanskap dan sejarah masyarakat dari kerajaan di *Limo Lo Pohalaa* . Selain itu penulis juga memperoleh banyak informasi melalui dokumen-dokumen dari pejabat Belanda yang pernah bertugas di Gorontalo seperti B, Korn (1937), Th. W.Crondijs (1930), H.H Morison (1928). Laporan mereka melalui *Memorie van Overgave*, memberikan gambaran secara umum keadaan daerah Gorontalo selama masa jabatannya. Laporan ini mencakup keadaan pemerintahan, penduduk, perekonomian, pertanian, lingkungan serta keadaan sosial dan budaya, sehingga sangat membantu dalam penelitian mengenai sejarah lokal.¹⁰

Berbagai penelitian dan kajian yang telah dibahas di atas setidaknya dapat menjadi referensi yang relevan dan signifikan untuk mendukung penelitian ini. Temuan dan analisis yang dihasilkan dari studi-studi terdahulu memberikan landasan dalam konteks historis yang memperkaya pemahaman tentang topik yang menjadi fokus penelitian ini.

1.5. Kerangka Konseptual dan Teoritis

Dalam kajian perkotaan secara tematik, memahami problematika yang berkembang itu sangat perlu. Sejarawan diharuskan meminjam konsep-konsep dan teori-teori ilmu-ilmu sosial jika ingin membahas perkembangan perkotaan secara tematik. Pembahasan kota secara tematik sebenarnya bukan semata-mata untuk melihat kota dari aspek strukturnya, karena perlu diingat bahwa yang dilakukan sejarawan adalah merekonstruksi sejarah. Aspek terpenting dari rekonstruksi sejarah adalah perkembangan, yang artinya sejarawan sangat terikat

¹⁰ Mona Lohanda, *Membaca Sumber Menulis Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 49-50.

dengan waktu.¹¹ Untuk itu, penulisan sejarah kota dengan pendekatan tematik tidak bisa meninggalkan aspek kronologisnya.

Berangkat dari topik utama dalam penelitian ini, maka untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, maka disusunlah kerangka konseptual dan teoritis. Penyusunan kerangka konseptual yang dibuat merujuk pada konsep dan teori-teori yang relevan dengan kajian penelitian yang dilakukan.

Memahami kota sebagai sebuah entitas dari sebuah masyarakat tidaklah mudah ditengah banyaknya pengertian tentang kota, yang mengarahkan pada pandangan tertentu. Kota adalah tempat hidup manusia yang sangat kompleks. Perkembangan dan pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia yang dilakukan di dalamnya, oleh karena itu definisi kota saat ini sangat bergantung pada sudut pandang seseorang dan bidang ilmu yang tersedia.

Sebuah kota dengan unsur manusia di dalamnya pastinya akan memberikan sebuah perubahan pada ruang-ruang yang ada di dalamnya. Manusia menyesuaikan diri dengan ruang di sekitarnya, namun pada saat yang bersamaan manusia mengubah ruang untuk suatu kepentingan, sehingga ruang terus berubah dan bergerak mengikuti dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Hal senada diungkapkan oleh Colombijn yang melihat kota sebagai sebuah ruang tertentu tempat manusia melakukan kegiatan. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam ruang, manusia senantiasa mengubah dan

¹¹ Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 11.

menyesuaikan diri sehingga ruang mengalami perubahan secara terus menerus.¹² Singkatnya ia memandang kota sebagai suatu ruang yang digunakan dan dihasilkan oleh manusia.

Ruang sendiri secara luas dapat diartikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Namun secara eksplisit pengertian ruang yang dimaksud dalam hal ini adalah ruang yang diciptakan manusia atau biasa disebut struktur ruang yaitu susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan serta sistem prasarana maupun sarana. Semua hal itu berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial-ekonomi yang secara hirarki berhubungan fungsional.¹³

Mengkaji masalah keruangan, seorang tokoh, Grunfeld, memandang kota sebagai suatu pemukiman dengan kepadatan penduduk yang lebih besar dari wilayahnya. Dengan berbagai struktur mata pencaharian non agraris, tata guna tanah yang beraneka ragam, serta gedung-gedung yang berdekatan. Selain itu terdapat beberapa bentuk fisik lainnya, yaitu fasilitas umum seperti jalan, air minum, penerangan, sarana ibadah, fasilitas pemerintahan, fasilitas perekonomian, komunikasi, serta lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan bersama

¹² Freek Colombijn, *op. cit.*, hlm. 1-2.

¹³ Jason J. Geovani, R. J. Poluan, Windy Mononimbar, "Kajian Struktur Ruang Kota Tomohon", *Spasial*, Vol 1, No 1 (2015), hlm. 46.

penduduknya.¹⁴ Grunfeld mendefinisikan kota dari unsur fisik sehingga apa yang dikemukakannya cenderung melihat kota sebagai sebuah kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat bangunan-bangunan dan segala perangkat pendukungnya.

Definisi kota oleh Max Weber cenderung melihat kota dari sisi ekonomi. Menurutnya, kota merupakan suatu tempat tinggal yang penduduknya terutama hidup dari perniagaan dan perusahaan.¹⁵ Dalam batasan ruang, kota adalah ruang yang tertutup dengan kumpulan pemukiman (seperti benteng) dan di dalamnya aspek pasar berbagai komoditas dipertukarkan.¹⁶ Kota adalah tempatnya pasar (*market place*), atau sebuah pemukiman pasar (*market settlement*).

Pengertian berbeda disampaikan oleh para sosiolog. Mereka menekankan aspek relasi antar penghuni kota. Seperti Wirth yang menyatakan bahwa kota adalah sebuah permukiman permanen dengan individu penghuninya yang heterogen, jumlahnya relatif luas dan padat, serta menempati areal tanah yang terbatas.¹⁷ Dengan kata lain kota adalah bentuk gabungan manusia yang heterogen yang hidup bekerja sama untuk mencapai apa yang diartikan dengan komunitas.

Dalam bukunya Urbanisasi dan Morfologi, Soetomo menekankan bahwa dalam memahami arti kota, tidak bisa terlepas dari dua aspek besar yang satu

¹⁴ Freek Colombijn, *op. cit.*, hlm. 5.

¹⁵ Ida Liana Tanjung, *Palembang dan Plaju: Modernitas dan Dekolonisasi di Perkotaan Sumatera Selatan Abad ke-20*, (Yogyakarta: Ombak, 2019), hlm. 8.

¹⁶ Dias Pradadimara, "Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah Makassar", dalam Freek Colombijn, dkk, (ed), *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 252.

¹⁷ S. Menno dan Mustamin Alwi, *Antropologi Perkotaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1966), hlm. 23.

sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Kedua aspek tersebut yang pertama adalah aspek fisik (terbangun dengan alam) sebagai wujud ruang dengan elemen-elemennya dan yang kedua adalah aspek manusia sebagai subjek pembangunan dan pengguna ruang kota. Lanjutnya, kota adalah tempat bermukim manusia dengan segala kehidupannya, maka kota adalah bagian dari *Human Settlement*.¹⁸ Oleh sebab itu, sebagai hunian manusia, kota berhubungan erat dengan ruang dan manusia. Kota juga dapat dipandang sebagai sebuah pola hubungan manusia antara kelompok, sebuah produksi dan distribusi ruang.¹⁹

Pandangan para ahli diatas masing-masing menjelaskan kota dari sudut pandang yang berbeda-beda, namun apa yang dikemukakan oleh para ahli ini sebenarnya telah menggambarkan wujud kota itu sendiri yang ditafsirkan ke dalam berbagai bentuk sesuai dengan minat dan keahlian yang dimiliki. Hal ini yang disebut oleh Nas sebagai fenomena sosial yang total. Artinya, kota berhubungan dengan berbagai macam aspek baik yang materil, maupun aspek sosial, kultural, linguistik, politis, dan ekonomi. Untuk itu, kota dipelajari oleh berbagai bidang keilmuan.²⁰ Sejatinya penafsiran kota yang berbeda-beda adalah merujuk pada keadaan dinamis kota yang berubah-ubah sesuai dengan generasi dan zamannya.

¹⁸ Sugiono Soetomo, *Urbanisasi dan Morfologi Proses Perkembangan Peradaban dan Wadah Ruang Fisiknya: Menuju Ruang Kehidupan yang Manusiawi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 34-35.

¹⁹ Kevin Lynch dalam Bambang Heryanto, *Roh dan Citra Kota. Peran Perancangan Kota sebagai Kebijakan Publik*, (Surabaya: Brilian Internasional, 2011), hlm 12.

²⁰ Peter. J.M. Nas, *Kota-Kota Indonesia: Bunga Rampai*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 206.

Pengertian kota sering dipahami dari berbagai sudut pandang yang sangat kompleks, dengan berbagai pendekatan terutama pendekatan metafora, yang dapat membantu kita memahami konseptualisasi berbagai aspek kehidupan kota ditinjau dari aspek sejarahnya.²¹ Hubungan relasi antar ruang kota dapat ditelusuri dengan menggunakan pandangan sejarah yang memanjang dalam waktu dan mengerucut pada persoalan sebab akibat. Untuk itu, perlu ada pemahaman dalam melihat relasi tersebut. Tulisan ini kemudian merupakan salah satu upaya dalam memahami konteks di dalam ruang dan masyarakat Gorontalo melalui pendekatan sejarah kota.

1.6. Metode Penelitian dan Sumber

Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer dan sekunder melalui studi pustaka. Sumber primer berupa arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda seperti *Corpus Diplomaticum*, *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, *Memorie van Overgave* (MvO), *Volkstelling*, *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, *Colonial Verslag*, *Catalogus Nederlandsche Kolonien*, dan *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*, serta *krant* atau *courant* Belanda. Sedangkan sumber sekunder berupa buku sejarah dan hasil penelitian terdahulu terkait Gorontalo. Sumber-sumber ini dapat diperoleh di beberapa kantor arsip seperti Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Daerah Provinsi Gorontalo, dan

²¹ Hestin Mulyandari, *Pengantar Arsitektur Kota*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), hlm. 2.

halaman website yang menyediakan berbagai arsip digital kolonial Belanda seperti *Delpher*, *Collectienederland.nl*, *Nationaal Archief*, *Digital Collections Leiden University Libraries*, dan *Colonial Architecture & Town Planning*. Pada tahap heuristik juga dilakukan metode observasi meliputi lingkungan fisik, artefak dan etno-sejarah dengan melakukan pengamatan masing-masing komponen kota dengan cara menganalisis bentuk fisik dan rancang bangunnya.²² Observasi lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi ruang berdasarkan bangunan-bangunan yang masih mempunyai relasi dengan masa lalu baik itu kondisi maupun persebarannya.

Setelah tahap heuristik, dilanjutkan pada tahap kritik sumber. Kritik yang digunakan dalam penelitian ini lebih kepada kritik intern, mengingat keterbatasan dalam melakukan kritik ekstern. Pada tahap ini bertujuan memverifikasi sumber-sumber yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat. Tahap selanjutnya adalah interpretasi, yaitu melakukan penafsiran terhadap data atau fakta-fakta yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber sejarah. Data yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologi. Pada tahap terakhir dari proses metode ini adalah historiografi, yaitu penulisan dan penyusunan sejarah.²³ Data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasi kemudian disusun secara kronologis dan kontekstual

²² Tim Penyusun, *Metode Penelitian Arkeologi*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1999), hlm. 185-187.

²³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), hlm. 69-82.

untuk menghasilkan sebuah narasi sejarah yang kredibel yang menjelaskan mengenai proses perkembangan Kota Gorontalo abad ke-18 sampai abad ke-20.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara utuh untuk menjawab permasalahan penelitian. Penjelasan tersebut secara spesifik dirangkum dalam lima bab yaitu pada *bab pertama*, merupakan bab pendahuluan yang berisi pengantar sebagai landasan pembahasan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan teoritis, metode penelitian dan sumber, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bagian ini akan membahas mengenai proses terbentuknya Kerajaan Gorontalo, cikal bakal terbentuknya Kota Gorontalo, menjelaskan konstruksi ruang kota Gorontalo yang dibangun oleh Raja Botutihe, serta kedatangan VOC dan pengaruhnya terhadap kekuasaan pemerintahan lokal.

Bab ketiga, pada bab ini akan membahas gejala perubahan demografis serta etnisitas di Kota Gorontalo. Aspek penting dari sebuah kota adalah masyarakat, untuk itu dalam bab ini akan menjelaskan perubahan demografis dari tahun ke tahun yang memperlihatkan pertumbuhan penduduk di Kerajaan Gorontalo pada umumnya, dan secara khusus pada Kota Gorontalo. Melihat sejauh mana perkembangan kelompok etnis pendatang terkait peran dan pengaruhnya dalam menciptakan kelompok-kelompok pemukiman di Kota Gorontalo.

Bab keempat, pada bagian ini akan membahas mengenai sejarah bangunan yang terdapat pada Kota Gorontalo pada abad 18 sampai abad ke-20. Sejatinya

dalam melihat perkembangan ruang kota, bangunan sebagai salah satu unsur terpenting dalam struktur fisik kota, berperan tidak hanya sebagai tempat tinggal atau tempat usaha, tetapi juga sebagai simbol identitas sosial dan sejarah yang melekat pada kota itu sendiri. Di Kota Gorontalo, proses perkembangan kota dapat dilihat melalui transformasi bangunan dan adaptasi fungsinya, yang merupakan refleksi dari perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada suatu masa tertentu.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi penjelasan tentang gagasan-gagasan utama atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diuraikan dalam beberapa bab sebelumnya. Bab ini menjawab secara singkat dan jelas atas permasalahan utama dan pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

BAB II

ANTARA KOTA KERAJAAN DAN KOTA KOLONIAL: KOTA GORONTALO ABAD XVIII-XIX

Memahami perubahan kota, konteks sejarah yang menggunakan pandangan jangka panjang merupakan alat analisa dalam melihat perkembangan suatu kota.¹ Oleh karena itu, penelitian terhadap ruang diawali dengan sejarah Gorontalo yang panjang. Periodeisasi perkembangan yang terjadi di Kota Gorontalo tentunya menyebabkan berbagai perubahan ruang, baik itu lingkungan fisik kota maupun lingkungan sosial. Untuk itu, mengawali tulisan dalam bab ini, akan diuraikan mengenai sejarah terbentuknya Kota Gorontalo, kemudian merekonstruksi ruang kota yang dibangun oleh Kerajaan Gorontalo dan kolonial Belanda, serta melihat perubahan politik, sosial, ekonomi serta budaya dalam kapasitasnya menjadi faktor penting dalam menerjemahkan pola keruangan yang ada di Kota Gorontalo.

2.1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kerajaan Gorontalo

Dalam berbagai catatan sejarah, penyebutan nama Gorontalo selalu mengarah pada salah satu kerajaan yang berada di dataran utara Pulau Sulawesi. Kerajaan ini memiliki pengaruh yang cukup luas di sepanjang perairan teluk Tomini dan sekitarnya, serta memiliki peran sentral dalam dinamika sosial politik dan budaya di kawasan tersebut, disamping beberapa kerajaan lainnya yang

¹ Freek Colombijn, *Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm. 4.

tergabung dalam persatuan politik yang dikenal dengan istilah *Limo Lo Pohalaa* (lima bersaudara). Di masa lalu, istilah kolektif *Limo lo Pohalaa* merujuk pada persatuan lima kerajaan besar yang berada di lembah Gorontalo. Persatuan ini berdasarkan kesamaan sosio-budaya dan regionalitas. Kerajaan-kerajaan tersebut terdiri dari Kerajaan Gorontalo, Limboto, Bone, Boalemo, dan Katinggola atau Andagile.² Perlu dipahami, walaupun tergabung dalam satu ikrar politik, masing-masing anggotanya menjalankan pemerintahan sendiri dalam batas teritorial kekuasaan kerajaan masing-masing.

Dalam tradisi lisan yang berkembang dalam masyarakat Gorontalo, asal-usul dari kerajaan-kerajaan yang ada di lembah Gorontalo pada awalnya merupakan kumpulan beberapa kelompok masyarakat berdasarkan ikatan genealogi, dalam istilah Gorontalo disebut *linula*. Kelompok ini dikepalai oleh seorang *olongia* (orang terkemuka, penghulu, raja). Masing-masing kelompok mendiami daerahnya sendiri.³ Pada tahap tertentu, *linula-linula* ini mengalami

² Harto Juwono dan Josephine Hutagalung, *Limo Lo Pohalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo*, (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 8.

³ B. J. Haga, *Lima-Pahalaa: Susunan Masyarakat, Hukum adat dan Kebijaksanaan Pemerintahan di Gorontalo*, (Jakarta: Djambatan, 1981), hlm.2. (*Linula* merupakan komunitas kecil yang didasarkan atas hubungan keturunan dan teritori. Sebelum terbentuknya *linula*, struktur masyarakat suku bangsa Gorontalo terdiri dari batih (*nuclear family*) yang disebut *Ngalaa* yang tinggal di sebuah rumah besar yang disebut *laihe*. Berkembangnya jumlah keluarga dalam setiap *laihe* memunculkan *laihe-laihe* lainnya. Untuk mempertahankan keutuhan wilayah serta mempererat hubungan darah maka beberapa *laihe* membentuk kelompok yang lebih besar yang disebut *lemboa*. Dalam *lemboa* biasanya masih terdapat seorang kakek dan nenek yang menjadi pemimpin *lemboa* (*bantalo*=kandungan). Kesamaan cerita mistis dan suci serta keyakinan akan nenek moyang yang sama merasa senasib dan sepenanggungan sehingga berdasarkan hal tersebut beberapa *lemboa-lemboa* membentuk satu kesatuan sosial yang lebih besar dan disebut *linula* (Yayasan 23 Januari 1942, *Perjuangan Rakyat di Daerah*

perkembangan yang memunculkan kesadaran akan pentingnya persatuan diantara mereka. Beberapa *linula* bersatu menjadi kelompok yang lebih besar, dengan identitas baru yaitu sebagai sebuah kerajaan (*lipu*). Kerajaan Gorontalo sendiri merupakan hasil integrasi dari tujuh belas *linula* yang terdiri dari: Holontalangi, Hunginaa, Lupoyo, Hungintie atau Bilinggata, Wabu, Lahengo atau Biao, Padengo, Hoangobotu oloala, Tapa, Lahuonu, Toto, Dumati, Hutidea, Pantungo, Panggulo, Hoanggobotu oloihi dan Tambu. Diantara ke-17 pemimpin *linula* tersebut, berkat kecakapan dan kecerdikannya, terpilihlah Wadipalapa atau yang dikenal sebagai Ilahudu, *olongia* dari Holontalangi sebagai raja pertama dari Kerajaan Gorontalo.⁴

Informasi tentang asal-usul Kerajaan Gorontalo juga dapat dibaca dalam tulisan Rosenberg yang menjelaskan bahwa:

Sebelum Kerajaan Gorontalo ada, banyak terdapat permukiman-permukiman kecil di dataran dan di pegunungan, masing-masing mempunyai pimpinannya sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri, dan hanya mempunyai hubungan persahabatan atau darah dengan para pimpinan permukiman yang lain. Kepala-kepala ini menyandang gelar *taudaa* (tuan besar); hanya sedikit kepala komunitas yang lebih besar yang memimpin *olongia* (raja). Di antara yang terakhir adalah Hoenginaa, Loepoijo, Bilingata, Waboe, Biawaho dan Padengo, empat di antaranya adalah yang terbesar. Selanjutnya di Pegunungan Kabila terdapat desa Holontalange dengan *olongia* sebagai kepalanya. *Olongia* ini, kerabat *olongia* Biawaho, adalah orang yang cerdas dan giat; dia meninggalkan gunung, turun ke dataran dan menikahi putri

Gorontalo Menentang Kolonialisme dan Mempertahankan Negara Proklamasi, (Jakarta: Yayasan 23 Januari 1942, 1982), hlm. 12-13).

⁴ G. J. F. Riedel, “Het landschappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo en Katinggola of Andagile”, *Tijdschrift van Bataviaasch Genootschap voor Indische Taal, Land, en Volkenkunde*, XIX, 1870, hlm. 103-104; Lihat juga Hasanuddin dan Basri Amin, *Gorontalo dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 16.

olongia dari Padengo. Dia kemudian juga pergi ke Hoenginaä, Loepoijo, Bilingata dan Waboe dan melalui persuasi berhasil membuat berbagai *olongia*, yang sampai sekarang berdiri sendiri, mengenalinya sebagai kepala. Para pemimpin desa lainnya mengikuti contoh ini dan juga tunduk pada otoritas *olongia* Holontalangé. Beginilah asal mula kerajaan Holontalangé, yang namanya lama kelamaan menjadi Holontalo, sebagaimana kata tersebut masih diucapkan oleh penduduk asli hingga saat ini.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dari 17 *linula* yang terintegrasi menjadi Kerajaan Gorontalo, terdapat empat *linula* memiliki peran besar, menjadi tiang utama dari berdirinya Kerajaan Gorontalo. Keempat *linula* ini kemudian dipercaya menjadi pewaris dan menjalankan sistem pemerintahan di Kerajaan Gorontalo.

Kerajaan Gorontalo pada awalnya dikenal dengan nama Kerajaan Hulontalangi atau Hulontalo, diperkirakan telah ada sejak abad ke-14. Namun, setelah kedatangan orang-orang Eropa, mereka mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata Hulontalo untuk menyebut nama kerajaan Hulontalangi, sehingga kata *Hulontalo* menjadi berubah bunyi menjadi “Horontalo”, maka dituliskan menjadi Gorontalo.⁶ Dalam laporannya, Rosenberg telah melakukan koreksi terhadap penyebutan nama Gorontalo, dengan mengatakan bahwa kota utama Gorontalo sebenarnya Hoelontalo dan di beberapa peta salah disebut menjadi Gorontalo atau Goenongtello.⁷ Namun, kata Gorontalo telah melekat dan diketahui luas oleh orang-orang Eropa sehingga dalam berbagai laporan tentang Kerajaan Gorontalo di masa lalu menggunakan nama tersebut.

⁵ C.B.H. Von Rosenberg, *Reistogten In De Afdeeling Gorontalo*, (Amsterdam: Frederik Muller, 1865), hlm 16-17; Baca juga Haga, *op.cit.*, hlm. 3.

⁶ Yayasan 23 Januari 1942, *op. cit.*, hlm. 5.

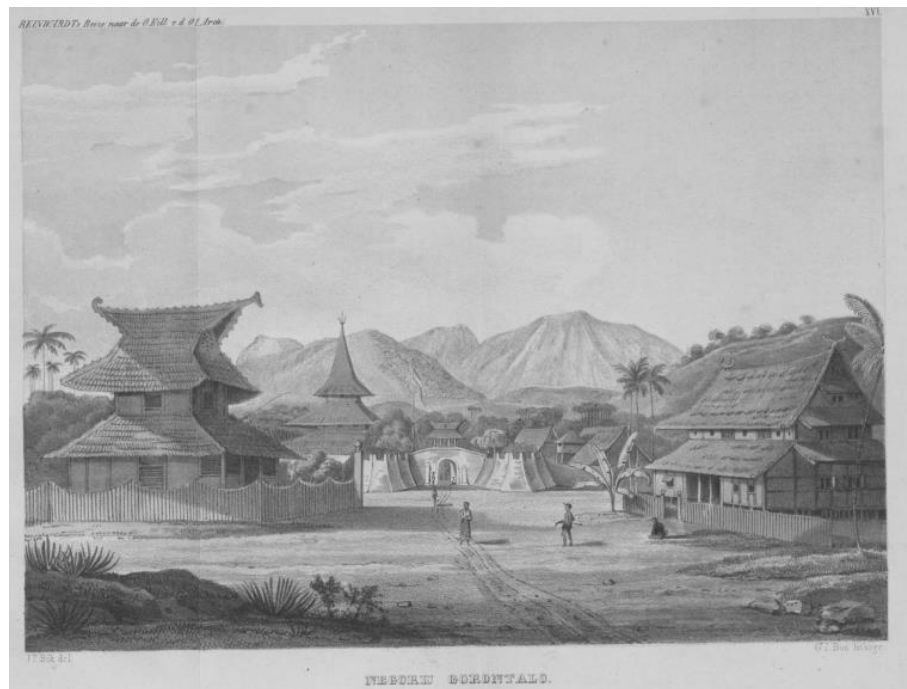
⁷ C.B.H. Von Rosenberg, *op. cit.*, hlm. 1.

Satu hal yang dirasa kurang dalam mengkaji sejarah Gorontalo adalah kurangnya sumber-sumber tertulis khususnya dari Kerajaan Gorontalo. Sumber mengenai sejarah kerajaan sebagian besarnya diperoleh melalui laporan-laporan orang-orang Belanda semasa tinggal atau melakukan penelitian di Gorontalo. Laporan pertama tentang Kerajaan Gorontalo ditulis oleh Robertus Padtbrugge, seorang Gubernur VOC yang berkedudukan di Maluku saat itu. Informasi mengenai Kerajaan Gorontalo disampaikan dari hasil perjalanannya pada saat mengunjungi Gorontalo pada 26 september 1677. Dalam laporannya ia menyebut meneruskan perjalanannya ke lokasi Kerajaan Gorontalo setelah sebelumnya mengunjungi Kwandang, Kerajaan Limboto. Lokasi ibukota Gorontalo berada sebelah utara aliran sungai, yang mengalirkan air danau dan segala air yang ditampung danau itu ke arah selatan, jarak antara dua tempat itu adalah kira-kira 3 mil; yang satu terletak di sebelah barat daya agak ke barat dan yang lain sebelah timur laut agak ke utara.⁸

Letak Gorontalo ketika itu lebih ke pedalaman yang dinamakan Lupoyo. Menurut Bastiaans berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa lokasi Lupoyo dapat dicari di perbatasan antara *onderdistrik-onderdistrik* Tibawa dan Telaga, kira-kira di tempat kampung Bulota sekarang. Akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan penggambaran Padtbrugge mengenai lokasi itu, empat tahun sesudah persekutuan itu dibuat. Kecuali, kalau diterima, bahwa sementara waktu itu

⁸ J. Bastiaans, "Het Verbond Tusschen Limbotto en Gorontalo", *Tijdschrift voor Indische Taal -, Landen Volkenkunde*, 78, 1938, hlm. 217; P. A. Leupe, "Het Journaal van Padtbrugges Reis naar Noord-Celebes en de Noordereilanden". *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 14 (1), 1867, hlm. 153-164.

jalannya Sungai Bulango dan luas Danau Limboto sudah mengalami perubahan-perubahan. Sehingga lokasi ini menurut Bastiaan masih perlu ditelusuri karena apa yang digambarkan oleh Padtbrugge tidak sesuai dengan hasil penelusurannya terkait letak kerajaan Gorontalo semasa kunjungan Padtbrugge.⁹



Gambar 2.1. Sketsa Negeri Gorontalo
(Sumber: Reinwardt, 1858)

Lokasi Kerajaan Gorontalo pada periode awal menurut beberapa sumber sering mengalami perpindahan. Perpindahan ini didasarkan oleh berbagai kepentingan politik, sosial, maupun ekonomi. Menurut Saptaningrum sebagai kota tradisional, pola tata kota lama Kerajaan Gorontalo sampai saat ini tidak terlihat. Hal ini dikarenakan struktur kekuasaan masa Kerajaan Gorontalo yang tidak turun temurun. Seorang raja dipilih berdasarkan musyawarah para penguasa (*olongia*) dari beberapa *linula*, sehingga pusat pemerintahan berpindah-pindah sesuai tempat

⁹ J. Bastiaans, *Het Verbond Tusschen Limbotto en Gorontalo*, *loc.cit.*

tinggal raja yang ditunjuk pada saat itu.¹⁰ Selain itu, faktor eksternal juga menjadi penyebab ibukota kerajaan sering kali berpindah tempat. Setelah beberapa kali mengalami perpindahan, pada akhirnya, ibukota Kerajaan Gorontalo menetap permanen pada pertengahan abad ke-18, yang kemudian berkembang menjadi Kota Gorontalo.

2.4. Cikal Bakal Terbentuknya Kota Gorontalo

Raja Holontalo tidak menetap di ibu kota Gorontalo yang sekarang, melainkan mendirikan sebuah kampung di lereng gunung antara Bolango dan Bone, kampung tersebut dinamakan Padengobroido (tampat bitjara), karena disepakati sana untuk bersatu satu sama lain menjadi satu kerajaan. Belakangan, pusat pemerintahan dipindahkan ke Duingi, sebuah tempat yang dekat dengan Bolango saat ini dan akhirnya, sebagai akibat dari kedatangan orang-orang Eropa, ke ibu kota yang sekarang.¹¹

Demikian kutipan dalam tulisan Rosenberg dari hasil kunjungan dinasny di Gorontalo. Menurut Rosenberg ibukota Kerajaan Gorontalo pada awalnya berada di daerah Padengobroido, diperkirakan di daerah Kabila. Kemudian dipindahkan ke Duingi. Pemindahan ibukota dari Padengobroido ke Duingi terjadi pada masa Raja Eyato. Pemindahan ini disebabkan adanya campur tangan politik dari VOC.¹² Selain itu, pemilihan Duingi sebagai lokasi kerajaan karena dianggap lebih aman dari bajak laut Tobelo dan Mangindanao, serta tempat yang lebih

¹⁰ Saptaningrum, "Kajian Tata Ruang Kota Gorontalo", dalam Irfanuddin Marzuki Wahid, *Arkeologi Perkotaan Gorontalo Perkembangan Kota dan Sebaran Bangunan Indis di Kota Gorontalo*, (Bali: Pustaka Larasan, 2020), hlm. 26.

¹¹ C.B.H. Von Rosenberg, *op. cit.*, hlm. 17.

¹² Hasanuddin dan Basri Amin, *Gorontalo Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 60.

tinggi sehingga cocok untuk pembangunan ladang.¹³ Akibat kedatangan orang-orang Eropa, lokasi ibukota kerajaan kemudian dipindahkan lagi ke lokasi yang sekarang dikenal sebagai Kota Gorontalo.

Sebagaimana yang diungkapkan Rosenberg, pemindahan ibukota kerajaan sebagai akibat dari kedatangan orang-orang Eropa. Menurut Riedel, pada awal abad-18 para wakil VOC di Gorontalo memaksa para tetua dan pengikutnya untuk tinggal di sekitar pemukiman VOC. Para kepala dan bangsawan yang terlibat dalam aktivitas ini mendengar bujukan yang berulang kali disampaikan. Tetapi kawula mereka yang akan kehilangan tanah dan tanaman yang berada di atasnya tidak mau mematuhi perintah tersebut. Mereka harus diusir dari tanahnya dengan kekerasan dan dipaksa, terutama setelah penuntutan penyetoran emas wajib demi kepentingan kompeni untuk tinggal di dusun-dusun antara tiga dan lima keluarga, namun kebanyakan dari mereka berada di luar jangkauan para kepala adat mereka.¹⁴ Para kepala rakyat diharuskan bertempat tinggal di ibukota, supaya mereka dapat lebih mudah diberi perintah oleh kompeni dan raja.

Sejalan dengan kebijakan VOC, mendorong Botutihe memindahkan ibukota kerajaan ke wilayah tersebut. Informasi lebih rinci mengenai pemindahan ibukota dijelaskan oleh Bastiaans. Dalam penelitiannya, ia menyebutkan:

...kediaman kerajaan, yang ditetapkan oleh Pangeran Botoetihe pada tanggal 6 Saban 1170 H. (era Masehi: 1756), ketika pada tahun tersebut para pangeran Gorontalo memindahkan kediamannya dari

¹³ J. Bastiaans, "Batatos in het Oude Gorontalo, in verband met den Gorontaleeschen Staatsbouw", *Tijdschrift voor Indische Taal -, Landen Volkenkunde*, 79, 1939, hlm, 31.

¹⁴ G. J. F. Riedel, *op. cit.*, hlm. 62 dan 111; B. J. Haga, *op. cit.*, hlm. 6.

Doengingi (tempat kampung tersebut berada), sekarang letaknya Toeladenggi, hingga sekarang Kotta Gorontalo.¹⁵

Kutipan di atas menjelaskan Kota Gorontalo didirikan pada 6 Saban 1170 H (dalam Masehi 25 April 1757), pada masa pemerintahan Raja Botutihe. Hal ini ditandai dengan berpindahnya kediaman para pangeran Gorontalo ke wilayah kotta, yang sekarang berada dalam wilayah administratif kelurahan Limba B, Kelurahan Biawo, dan Kelurahan Heledula Selatan, Kota Gorontalo. Di ibukota yang baru, Botutihe mendirikan sebuah tatanan kota yang lebih terstruktur dan terorganisasi berdasarkan hierarki sosial dan politik. Menyusun pemerintahan yang kuat dengan mengatur tempat yang layak, sehingga para pembesar terkumpul pada suatu tempat yang strategis.¹⁶ Kecenderungan pemilihan lokasi bagi kota-kota tradisional sering kali dipengaruhi oleh pandangan politik dan sosial.¹⁷ Disamping itu, akibat intervensi dan pengaruh keberadaan koloni Belanda, membuat tata kota yang dirancang oleh Botutihe terkesan elitis dan sentralistik dan dibangun dalam suasana kekhawatiran ekspansi teritorial VOC.¹⁸

Saat membaca tulisan Bastiaans lebih teliti, nampaknya dalam tulisannya sendiri terdapat kontradiktif mengenai tahun pemindahan ibukota Kerajaan Gorontalo ke wilayah kotta. Pemindahan ibukota oleh Botutihe seperti yang

¹⁵ Bastiaans, Batatos in het Oude Gorontalo, in verband met den Gorontaleeschen Staatsbouw, *op. cit.*, hlm. 25.

¹⁶ Yayasan 23 Januari 1942, *op. cit.*, hlm. 29

¹⁷ Amos, Rapoport, *House Form and Culture*, (Prentice-Hall, 1969), hlm. 30.

¹⁸ Basri, Amin, *Memori Gorontalo: Teritori, Transisi dan Tradisi*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 53-54.

dijelaskan Bastiaans terjadi pada tahun 1756, sedangkan dalam keterangan peta yang diperolehnya dari seorang informannya bertuliskan:

“Daerah (Bendar) Gorontalo, dipendirikan oleh Padoeka Radja Botoetihe moelai didiami pada 6 Saban 1140 Hidjriah (Rabu, 17 Maret 1728 M), dipindahkan hoeloe negeri dari tanah Doengingi (kampong Toeladengi)”.¹⁹

Terdapat selisih angka yang cukup jauh antara penjelasan Bastiaans dan keterangan pada peta tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah apakah ada “kesalahan” dalam penulisan peta atau “kesalahan” pada pernyataan Bastiaans yang tidak memperhatikan angka tahun dalam peta tersebut. Bila merujuk pada tahun 1728 maka pada masa ini Botutihe belum diangkat menjadi Raja Gorontalo. Botutihe baru diangkat menjadi raja dan dilantik pada 9 Juli 1737 dan mengajukan pengunduran diri tahun pada tahun 1757.²⁰ Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipertimbangkan angka 1170 H (1756 M) sebagai awal pemindahan ibukota Kerajaan Gorontalo. Mengingat pada masa ini Botutihe masih menjabat sebagai Raja Gorontalo walaupun satu tahun kemudian ia mengundurkan diri sebagai raja.

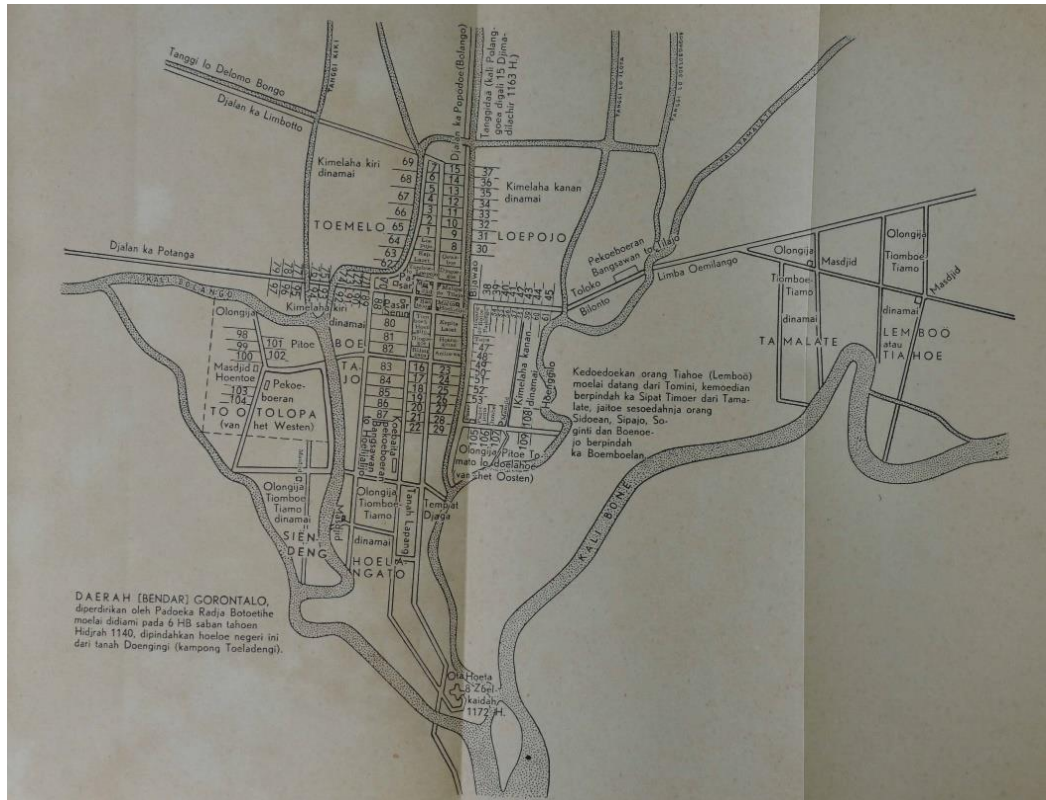
2.3. Penataan Ruang Kota Masa Botutihe

Berkat peta dari Bastiaans, bentuk dan struktur dasar Kota Gorontalo pada masa kerajaan khususnya pada masa pemerintahan Botutihe masih dapat diketahui. Berdasarkan gambaran peta tersebut, dapat dilihat bahwa Botutihe membangun sebuah pusat pemerintahan yang diintegrasikan dengan pusat

¹⁹ J. Bastiaans, *Batatos in het Oude Gorontalo, in verband met den Gorontaleeschen Staatsbouw*, *op. cit.*, hlm. 73.

²⁰ F. W. Stapel, *Corpus diplomaticum Neederlando-Indicum Zesde Deel*. (1753-1799). (S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1955), hlm. 138.

pemukiman bagi pembesar kerajaan, jalan, saluran irigasi, pasar, sarana ibadah serta kompleks pekuburan.²¹



Peta 2.1. Peta Kota Gorontalo pada masa Raja Botutihe
(Sumber: J. Bastiaans, 1839)

Berdasarkan gambaran peta di atas, dapat dilihat bahwa Botutihe membangun sebuah pusat pemerintahan yang diintegrasikan dengan pusat pemukiman, jalan, saluran irigasi, pasar, tempat ibadah serta kompleks pekuburan. Menurut Bastiaans pengelompokan pemukiman di pusatkan di sekitar maligai (Maligai to Tilayo dan Maligai Hoelialiyo). Disekelilingnya terdapat masjid,

²¹ Peta Kota Gorontalo masa Botutihe diperoleh oleh Bastiaans dari salah seorang anggota majelis pengadilan pribumi Gorontalo yang bernama Taloe Jasine, sekaligus penulis dari peta tersebut. Taloe Jasine, berdasarkan informasi dari nenek moyangnya yang banyak dari mereka memegang jabatan *Sikili*, yaitu juru tulis pengadilan di pengadilan Gorontalo, kemudian merekonstruksi keadaan Kota Gorontalo semasa Pemerintahan Botutihe.

Bantajo (dewan adat) serta kediaman para pembesar-pembesar kerajaan seperti para ahli waris *linula* (kelompok-kelompok pendiri kerajaan), Kapiten Laut, dan *Jogugu*. Penataan Kota Gorontalo di masa Botutihe memperlihatkan ciri kota tradisional yang umum terjadi pada kota-kota kerajaan di Indonesia. Pola sosio kultural nampak jelas dalam penataan pemukiman dengan menempatkan rumah-rumah bangsawan dan pejabat kerajaan berada di sekitar istana dan di bagian lainnya terdapat tempat ibadah dan pasar. Di banyak masyarakat tradisional, rumah-rumah elit sosial seperti bangsawan dan pejabat ditempatkan pada lokasi strategis di sekitar pusat kekuasaan²², ini mencerminkan hierarki sosial berlaku pada masyarakat tersebut. Di sisi lain, keberadaan masjid yang berada tepat di sebelah istana raja menunjukkan kehidupan spiritual menjadi salah satu pengisi penting dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam tradisi Jawa, masjid menjadi rujukan bagaimana kegiatan religius yang terorganisir diberi tempat sebagai bagian sentra kekuasaan.²³ Begitu juga di Kerajaan Gorontalo, masjid menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan raja dan masyarakatnya. Untuk itu masjid diletakkan pada posisi yang strategis di pusat kekuasaan.

Tatanan kota yang dirancang oleh Botutihe pada awalnya mengkhususkan pemukiman bagi pembesar-pembesar kerajaan. Dalam perkembangannya, penduduk kota yang berada dalam komunitas *linula-linula* semakin bertambah. Untuk itu, di beberapa tempat disediakan pemukiman bagi ahli waris dari *linula-*

²² Peter J. M. Nas, *Kota-Kota Indonesia - Bunga Rampai*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 208

²³ A. Bagoes P. Wiryomartono, *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 9.

linula. Ahli waris ini merupakan kelompok utama dari pendiri Kerajaan Gorontalo. Pada peta di atas, pemukiman pembesar kerajaan dan ahli-ahli waris ditandai dengan nomor dari 1-109. Setiap angka menunjukkan lokasi pemukiman yang dimiliki oleh setiap golongan yang mendiami Kota Gorontalo. Nomor 1-15 menunjukkan golongan pejabat pusat yang diartikan sebagai golongan anggota kerajaan. Pemukimannya tersusun rapi memanjang ke utara dari Istana raja dan Masjid; nomor 16-29 menunjukkan pemukiman ahli waris *walaäpulo* atau pembantu Marsaoleh, selain itu terdapat juga pewaris dari *wuleja lo lipu* Lupojo, *Kapitan laut*, dan penghulu *walaäpulo*, pemimpin dan kepala kelompok *walaäpulo*, Tomboeli lo Lupojo; selanjutnya terdapat tanah dari *wuleja* Wuwaboe, salah satu dari dua *jogugu*. Lokasinya berada di selatan dari istana raja; nomor 30-61 masih merupakan pemukiman bagi keturunan dari *walaapulo*, namun terbagi menjadi dua golongan, yaitu kelompok yang berada di bawah Lupojo dan kelompok yang berada di bawah Hunggilo; nomor 62-97 merupakan kelompok yang berasal dari nenek moyang orang-orang Suwawa. Orang-orang ini berada di bawah kelompok Toemelo dan Boetaijo. Selanjutnya, nomor 98-109 merupakan kelompok dari nenek moyang Tominian. Kelompok ini terdiri dari: a) tujuh pangeran dari barat, *olongia pitoe tootolopa*; b) kelompok *olongia* Tiombetiano dinamai Siendeng; c) Kelompok *olongia* Tiombetiamo dinamai Hoelangato; d) tujuh pangeran dari timur, *olongia pitoe tomato lo doelahoe*; e) kelompok *olongia* dinamai Lemboo atau Tiahoe; f) kelompok *olongia* tiambetiamo dinamai Tamalate; g) kelompok *olongia* dari Siduan, Sipajo, Soginti dan Boenoejo. Namun kemudian mereka pindah ke pemukiman pengikutnya di Bumbulan untuk

memimpin operasi penambangan emas di sana.²⁴ Selain daripada itu, pemukiman penduduk lainnya tersebar di sekitar kota.

Selain penataan pemukiman bagi pembesar dan ahli waris dari *linula*, Botutihe juga merancang pembangunan saluran irigasi. Pembangunan ini merupakan salah satu dari ide cemerlang lainnya yang dibuat oleh Botutihe. Pembangunan saluran irigasi menunjukkan perhatian Botutihe akan pentingnya pertanian bagi kelangsungan bagi sebuah kota. Adanya saluran irigasi membuat sawah-sawah di sekitar kota dapat terairi, sehingga memenuhi kebutuhan utama bagi kehidupan perkotaan. Tacco dalam tulisannya bahkan memberi pujian kepada Botutihe atas ide cemerlangnya dalam membangun jalur irigasi yang membelah wilayah Kota Gorontalo. Ia mengatakan:

Kita harus memberikan kehormatan kepada raja ini sebagai orang pertama di antara rekan-rekannya yang mengakui manfaat pertanian dan peternakan bagi kemakmuran negara. Sambungnya, ia mengungkapkan terkait dengan pembangunan sistem irigasi, terdapat kesulitan-kesulitan yang ditemui oleh Botutihe dan rakyatnya disebabkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan peralatan yang masih “primitif”. Namun kesulitan-kesulitan ini dapat diselesaikan oleh Botutihe dan rakyatnya dengan cara yang brilian. Dia hanya mendaki salah satu puncak pegunungan Hulapadas - sekarang dikenal sebagai "Patoi-Bantela", secara harfiah: tiang bendera, puncak yang tingginya menandakan mendekatnya kapal - di mana dia memiliki "peta dataran", yaitu gambaran yang jelas mengenai bangunan yang akan diairi, ia tinggal berbulan-bulan dan dari sana memberikan perintah dan petunjuknya tentang arah saluran irigasi. Karya seni ini, selesai sekitar tahun 1739, masih dikenal sampai sekarang dengan nama "Tanggidail" (Tanggidaa).²⁵

²⁴ J. Bastiaans, *Batatos in het Oude Gorontalo, in verband met den Gorontaleeschen Staatsbouw*, *op. cit.*, hlm. 70-72.

²⁵ Richard Tacco, *Het Volk van Gorontalo: Historisch, Traditioneel, Maatschappelijk, Cultureel, Sociaal, Karakteristiek en Economisch*, (Gorontalo: YO UN ANN & CO, 1939), hlm. 107.

Sebelum saluran irigasi dibuat, tidak ada padi yang terlihat di daerah-daerah tersebut. Padi hanya ditemukan di daerah dataran tinggi di kabupaten-kabupaten sekitar. Penduduk juga lebih memilih berladang dengan sistem berpindah-pindah. Kedudukan kota yang mengalir dua sungai besar di sekitarnya, memberi dampak tersedianya pasokan air bagi pengembangan lahan pertanian. Namun, besarnya aliran sungai yang mengalir melalui dataran tersebut membuat irigasi menjadi lebih sulit.²⁶ Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan peralatan yang masih sederhana untuk membuat saluran irigasi. Dengan bantuan rakyat dan panduan yang diberikan oleh Botutihe, selama berbulan-bulan dapat berhasil membangun saluran irigasi yang mengalir membelah dari utara sampai ke selatan kota.²⁷

Kembali pada situasi yang ditunjukkan peta di atas, pada bagian selatan, tepat berada di pertemuan aliran sungai Bolango dan Bone, terdapat sebuah benteng yang bernama *Ota Hoeta* yang didirikan pada 8 Zoel kaidah 1172 H, dalam tahun Masehi 3 Juli 1759. *Ota* sendiri dalam bahasa lokal memiliki arti benteng, sedangkan *Hoeta* berarti tanah, sehingga *Ota Hoeta* dapat diartikan sebagai benteng yang terbuat dari tanah. Dari beberapa sumber yang ditemukan, nama *Ota Hoeta* tidak pernah disebutkan dalam catatan manapun. Informasi mengenai benteng tersebut hanya bisa dilihat dari peta di atas. Namun, dari penggambaran Hart saat pertama kali memasuki Kota Gorontalo, ia menyebutkan

²⁶ David Henley, *Fertility, Food And Fever Population, Economy And Environment In North And Central Sulawesi, 1600-1930*, (Leiden: KITLV Press, 2005), hlm. 63.

²⁷ Richard Tacco, *loc. cit.*

bahwa tepat di depan lokasi kapal Argo dan Bromo berlabuh, di tepi sungai, sebuah pintu pabean dibangun pada ujung tanah menggantikan benteng Gonta, yang dibongkar pada tahun 1842. Benteng ini dulunya berfungsi untuk melindungi jalan masuk sungai terhadap perompak.²⁸ Kemungkinan besar benteng Gonta yang dimaksud Hart adalah benteng Hoeta yang dibangun setelah masa Botutihe, kemudian di lokasi yang sama dibangun benteng baru Nassau. Selain itu, terkait benteng yang didirikan pada masa kerajaan, terdapat juga sebuah benteng yang berada di pusat kerajaan yang dikenal sebagai benteng Kotabadja. Lokasinya berada di belakang masjid kerajaan.²⁹ Melalui informasi yang disampaikan Reinwardt, diketahui bahwa lokasi istana raja dan masjid pada awalnya berada dalam sebuah benteng. Keberadaan benteng ini tidak bertahan lama karena benteng raja sudah sangat rapuh, namun tembok dan tiga pintunya masih sangat baik. Di dalam benteng itu tinggal dua orang raja di rumah yang kecil, dua rumah yang terbuat dari batu besar yang dulu berdiri telah runtuh dan hanya menyisakan sebagian temboknya.³⁰

Bila dilihat dari bentuk fisik ruang kota, penataan kota pada masa Botutihe memberikan gambaran bahwa kota ini didesain dengan cukup matang. Barisan rumah ditata mengikuti pola jalan yang saling memotong dengan sudut 90°. Di

²⁸ C. van der Hart, *Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige der Moluksche eilanden*, ('s Gravenhage: K. Fuhri, 1858), hlm. 225.

²⁹ Keadaan benteng saat ini tidak lagi utuh hanya tersisa dinding yang menjadi pembatas makan dan pemukiman/pertokoan. Lihat Irfanuddin Marzuki, *op. cit.*, hlm. 28.

³⁰ C. G. C. Reinwardt, *Reis naar het Oostelijke gedeelte van den Indische Archipel in het jaar 1821*, (Amsterdam: Frederik Muller, 1858), hlm. 509.

kiri dan kanan jalan di isi oleh bangunan rumah-rumah. Tataan ini kemudian menggambarkan bentuk dasar dari struktur ruang Kota Gorontalo. Menurut Marzuki, pola tata ruang yang terbentuk di Kota Gorontalo pada masa kerajaan, mengikuti pola kota papan catur (*gridiron pattern*). Pola ini membagi kawasan kota dengan bentuk persegi yang dibatasi dengan jalan.³¹ Walaupun dalam konsep kota yang dipahami masih digolongkan sebagai kota tradisional, karena karakteristik budaya seperti teknologi yang digunakan di kota pra industri relatif sederhana.³² Namun, pada masa itu, penataan ruang kota dibuat dengan pertimbangan yang memungkinkan penghuninya dapat menetap secara layak. Hal ini terlihat dari rancangan kota dengan latar belakang pengelolaan lingkungan yang teratur dan tersediannya sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

2.4. Kedatangan VOC dan Intervensi Kolonial di Gorontalo

Masuknya VOC di daerah Gorontalo tidak lepas dari pengaruh perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Dalam perjanjian tersebut salah satu pasalnya menyebutkan bahwa Gowa harus menarik diri dari seluruh wilayah pedalaman dan Pantai Sulawesi serta menyerahkan seluruh daerah pengaruhnya di Sulawesi Utara, Timur, dan Tenggara kepada Ternate.³³ Dukungan Ternate kepada Belanda dalam memerangi Makassar memberikan konsesi perluasan wilayah kepada

³¹ Irfanuddin Marzuki Wahid, *op. cit.*, hlm. 30.

³² Gideon Sjoberg, *The Preindustrial City, Past and Present*, (New York: The Free Press, 1960), hlm. 133.

³³ J. E. Heeres, "Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum, Tweede Deel. (1650-1675)". *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*, 87, V-625, 1931, hlm. 370-380.

Ternate.³⁴ Akibatnya sejak tahun 1667 Gorontalo, Limboto, dan *Limo Lo Pohalaa* langsung berada di bawah kekuasaan Ternate.³⁵ Perjanjian antara Gowa dan VOC pada hakikatnya memberi legalitas kepada Ternate untuk menguasai wilayah Kerajaan Gorontalo. Akibat peristiwa tersebut, VOC berhasil menempatkan gubernurnya di Ternate (Kepulauan Maluku) untuk memudahkan pengaturan kewenangannya atas tanah-tanah yang berada di bawah pengaruh Gowa dan Ternate.³⁶

Setelah Ternate memperoleh wewenang atas wilayah Gorontalo, sejumlah perubahan dilakukan Ternate dengan melakukan penyesuaian model dan struktur pemerintahan di Gorontalo. Atas dasar inilah terdapat banyak kesamaan jabatan dalam pemerintahan Gorontalo yang mirip dengan Ternate. Penambahan jabatan baru dalam pemerintahan dilakukan untuk membantu raja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. *Jogugu* atau *hohuhu* yang merupakan jabatan strategis

³⁴ Harto Juwono dan Yosephine Hutagalung, *op. cit.*, hlm. 63.

³⁵ Beberapa sumber menjelaskan bahwa hubungan Kerajaan Ternate dengan Kerajaan Gorontalo telah terjalin sejak dulu, bahkan jauh sebelum penyerahan konsesi kekuasaan dari VOC atas kerajaan-kerajaan di wilayah *Limo Lo Pohalaa*. Gorontalo dulunya dianggap berada di bawah pengaruh (*vasal*) Ternate, terutama pada periode pengaruh Sultan Baabullah Daud Syah (1570-1583) dikenal dengan julukan sebagai “raja 72 pulau”. Pada masa puncak kejayaannya, Babullah menempatkan 10.000 pasukannya di Gorontalo dan Limboto. Walaupun demikian, pada dasarnya Gorontalo dan Ternate mempunyai hubungan persekutuan atau persaudaraan dalam arti kedudukan Ternate sebagai saudara tua, sedangkan Gorontalo sebagai saudara muda. Ini tidak mengherankan karena dalam banyak hal Gorontalo menerima pengaruh Ternate. (Hasanuddin dan Basri Amin, *op. cit.*, hlm. 4; Francois Valentijn, *Oud en Nieuw Oost-Indien, Vervattende een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten*, Volume 1a, (Dordrecht: Joannes van Braam, 1724), hlm. 79.

³⁶ Hasanuddin dan Basri Amin, *op. cit.*, hlm. 57.

ditambahkan dalam pemerintahan Gorontalo oleh Ternate. Jabatan ini cukup strategis karena wewenang dalam membantu raja dalam menjalankan keputusannya dan menyampaikannya kepada warga. Selain itu beberapa nama jabatan diganti seperti *olea lo lipu* dan *tandaa* yang merupakan kepala kampung atau kepala *negori* diganti menjadi *Marsaoleh* dan *Kimalaha*. selain itu terdapat jabatan *kapiten laoet* untuk memimpin armada laut sama seperti jabatan di Ternate.³⁷

Dalam menegakkan pengaruhnya atas Gorontalo, Ternate tidak serta merta lepas dari kontrol VOC. Melalui Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Maluku, VOC mengontrol Ternate agar dapat menerapkan kebijakan-kebijakan di wilayah *Limo Lo Pohalaa*. Kebijakan tersebut salah satunya adalah penarikan upeti berupa hasil hutan dan hasil bumi yang akan disetorkan kepada pihak VOC, setelah sebagian hasilnya disisihkan untuk penguasa Ternate.³⁸ Kebijakan yang diterapkan Ternate pada dasarnya tidak begitu disukai oleh para penguasa dan rakyat di *Limo Lo Pohalaa* khususnya mengenai penyerahan upeti kepada Ternate. Penerapan kebijakan ini pada akhirnya melahirkan kekecewaan dan keinginan untuk melepaskan pengaruh dari Ternate. Untuk itu raja-raja di *Limo Lo Pohalaa* bersepakat untuk memohon bantuan kepada VOC sebagai satu satunya

³⁷ B. J. Haga, *op. cit.*, hlm. 6; Baca juga Harto Juwono dan Yosephine Hutagalung, *op. cit.*, hlm. 68-69.

³⁸ Harto Juwono dan Yosephine Hutagalung, *op. cit.*, hlm. 69.

kekuatan yang dianggap mampu untuk menghilangkan pengaruh Ternate.³⁹ Melihat kondisi yang terjadi di Gorontalo, VOC menganggap Ternate tidak mampu untuk menjaga kestabilan dan ketertiban di Gorontalo, sehingga setelah satu dekade kekuasaannya di Gorontalo, Ternate bersedia melepaskan pengaruh dan tuntutan atas wilayah-wilayah di *Limo Lo Pohalaa* melalui perundingannya dengan Gubernur VOC Robertus Padtbrugge.⁴⁰ Untuk itu pada tahun 1677 kekuasaan dan wewenang untuk mengatur kekuasaan dan pemerintahan di Gorontalo diambil alih oleh VOC.⁴¹ Atas dasar ini, Padtbrugge kemudian melakukan kunjungan ke Gorontalo dan Limboto untuk membuat persekutuan yang diikat dalam beberapa pasal perjanjian.

Setelah Belanda mengambil alih kekuasaan dari Ternate, pengaruh kekuasaan kolonial langsung dirasakan khususnya oleh Kerajaan Gorontalo dan Limboto dengan penerapan pasal-pasal pada perjanjian kontrak yang telah disepakati oleh penguasa lokal dan VOC. Mulai dari monopoli perdagangan, penyetoran upeti, intervensi terhadap pemerintahan yang berkuasa, pengaturan keamanan, dll.⁴² Pasal-pasal yang diterapkan VOC terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah *Limo Lo Pohalaa* secara menyeluruh disusun untuk

³⁹ J. E. Heeres & F. W. Stapel, "Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum, Derde Deel, (1676-1691)", *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*, 91, V-616, (1934). hlm. 56-57. dan 126-137.

⁴⁰ Harto Juwono dan Yosephine Hutagalung, *op. cit.*, hlm. 69-72.

⁴¹ G. J. F. Riedel, *op. cit.*, hlm.109; M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadj Mada University Press, 2005), hlm. 99.

⁴² Baca pasal-pasal yang terdapat pada *Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum, Derde Deel*, hlm. 126-137.

menunjukkan penegakan kekuasaan VOC atas negeri-negeri tersebut. Tidak hanya pada penegakan hegemoni ekonomi, pada dasarnya secara administratif kekuasaan kaum pribumi harus patuh dan tunduk terhadap pengaturan yang buat oleh VOC selaku pemegang hegemoni tertinggi di kawasan ini.⁴³

Pada awal abad ke-19 merupakan masa-masa penting bagi Pemerintah Belanda. Pada masa ini terjadi jeda kekuasaan dengan beralihnya kekuasaan Pemerintahan Belanda atas wilayah jajahan di Hindia Belanda. Hal tersebut terjadi sebagai dampak dari perang-perang yang terjadi di Eropa pada masa itu. Peralihan pertama terjadi pada tahun 1808-1811 dimana wilayah jajahan Hindia Belanda beralih dari Pemerintahan Belanda ke Pemerintahan Perancis. Kemudian pada tahun 1811-1816, terjadi peralihan kembali, dari Pemerintahan Prancis ke Pemerintahan Inggris.⁴⁴ Selama berkuasa di wilayah Hindia Belanda, Inggris membuat sebuah kebijakan mengenai pembaharuan pada wilayah administrasi pemerintahan. Beberapa wilayah di Hindia Belanda seperti wilayah di Karesidenan Ternate mengalami perubahan. Wilayah Karesidenan Gorontalo dan Manado semula berada di bawah Karesidenan Ternate kemudian dipisahkan. Karesidenan Gorontalo dihapus dan digabungkan dengan Karesidenan Manado.⁴⁵

Setelah wilayah jajahan Belanda kembali pada tahun 1816, dan Inggris memutuskan meninggalkan wilayah Hindia Belanda, keadaan wilayah

⁴³ Walaupun VOC memegang kontrol atas kerajaan-kerajaan di wilayah *Limo Lo Pohalaa*, kekuasaan kerajaan-kerajaan lokal masih dipegang oleh raja untuk mengatur wilayah dan rakyatnya.

⁴⁴ M. C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 170-174.

⁴⁵ Harto Juwono dan Yosephine Hutagalung, *op. cit.*, hlm. 237.

administrasi masih tetap sama. Wilayah Gorontalo masih tetap berada di bawah Karesidenan Manado. Hal ini terjadi karena keputusan dari Van Der Capellen yang menganggap Gorontalo dan Manado tidak seharusnya berada di bawah Ternate. Untuk itu, pada tanggal 14 Juni 1824, melalui keputusan Pemerintah Hindia Belanda, wilayah Gorontalo dan Manado dipisahkan secara resmi dari Karesidenan Ternate. Keputusan ini juga memuat aturan pembentukan wilayah Karesidenan baru yaitu Karesidenan Manado yang mencakup dua wilayah, yaitu Minahasa dan Gorontalo. Masing-masing wilayah diperintah oleh seorang asisten residen yang bertanggung jawab langsung kepada Residen Manado.⁴⁶

Sejak awal masuknya hingga pertengahan abad ke-19, sistem kerajaan di Gorontalo masih dipertahankan oleh pemerintah Belanda. Tidak hanya di Gorontalo, di berbagai wilayah di Nusantara, sistem kerajaan masih dipertahankan sebagai bagian dari strategi Belanda dalam memanfaatkan struktur politik dan sosial yang dominan masih dipegang oleh raja-raja. Melalui pendekatan ini, Belanda bisa mengendalikan kerajaan-kerajaan lokal secara tidak langsung dengan tetap mengakui kedaulatan simbolis raja. Pendekatan ini memungkinkan Belanda dalam menjalankan kontrol politik dan ekonomi yang efektif, sambil meminimalkan potensi perlawanan dari penduduk setempat.⁴⁷

⁴⁶ *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1824, No. 28a.

⁴⁷ Jafar, Ahmad, "Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pemerintah Hindia Belanda dalam Mempertahankan Wilayah Kolonialnya di Indonesia Tahun 1942", *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 5 (2), 184. <https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.44145>.

Pada pertengahan abad ke-19, keadaan pemerintahan lokal di Gorontalo dianggap sudah tidak mewakili kepentingan Pemerintah Belanda. Berbagai kebijakan seperti penerapan sistem pajak dalam bentuk uang dan hasil bumi dianggap tidak berhasil. Begitu juga dengan sistem tanam paksa atau *Cultuur Stelsel* tidak dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan pemerintah Belanda. Hal ini diakibatkan karena pihak kerajaan dinilai tidak dapat menerima maksud-maksud pemerintah Belanda yang modern dengan menghalang-halangi penerapan kebijakan-kebijakan tersebut.⁴⁸ Sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah lokal mendorong pemerintah Belanda mulai mempertimbangkan peran mereka untuk keberlangsungan Pemerintahan Belanda di Gorontalo. Atas dasar ini, muncul gagasan untuk menempatkan wilayah Gorontalo di bawah pemerintahan langsung (*rechtstreeks bestuur*) dengan menghapus pemerintahan lokal dan menempatkan pejabat pemerintah asisten residen serta kontrolir di berbagai wilayah bekas kerajaan.

Penerapan sistem pemerintahan langsung memberi pengaruh besar terhadap perubahan struktur politik, tidak hanya pada Kerajaan Gorontalo, tetapi juga di kerajaan-kerajaan lain yang tergabung dalam *Limo Lo Pohalaa*. Sebelum kebijakan ini diterapkan, pemerintah Belanda terlebih dahulu telah melakukan perubahan melalui intervensi politik yang bertujuan agar sistem pemerintahan modern yang dijalankan oleh pemerintah Belanda secara perlahan dapat diterima oleh kerajaan dan masyarakatnya. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan membagi membagi wilayah Kerajaan Gorontalo ke dalam empat distrik. Pada

⁴⁸ Harto Juwono dan Yosephine Hutagalung, *op. cit.*, hlm. 285-386.

tahun 1856 Kerajaan Gorontalo dibagi menjadi empat distrik, yaitu Distrik Kota, Telaga, Kabila dan Tapa.⁴⁹ Setiap distrik dikepalai oleh seorang *wulea lo lipu*⁵⁰ yang selanjutnya disebut *Marsaoleh* (setingkat camat).

Keputusan penerapan sistem pemerintahan langsung akhirnya dikeluarkan oleh Gubernemen pada tahun 1864, namun dalam pelaksanaannya untuk sementara ditunda. Konsekuensi dari penundaan ini memutuskan bahwa raja-raja yang berhenti atau yang dihentikan, tidak diganti lagi dan pemerintahan kerajaan beralih ke *de facto*, walaupun tidak formil, kepada para kepala distrik, para *wulea lo lipu* di kerajaan-kerajaan besar yang besar dan kepada para *jogugu* di kerajaan-kerajaan kecil. Dalam praktek hak-hak istimewa raja beralih pula dari raja kepada mereka.⁵¹ Pada masa ini menurut laporan beberapa asisten residen, mengalami “kekosongan” pemerintahan akibat kontrak-kontrak yang dahulu yang mengikat para raja-raja sudah tidak berlaku dan tidak dijalankan karena bersamaan dengan Keputusan Gubernemen 14 September 1864 No.17 tentang pembentukan distrik, berlaku juga pembatalan kontrak-kontrak yang diadakan antara Pemerintah Belanda dengan raja-raja di *Limo Lo Pohalaa*.

Hal ini terus berlangsung sampai pada akhirnya akibat desakan dari Residen Manado dan Asisten Residen Gorontalo yang dulu dan yang sekarang (G.A Scherer dan G.W.W.C. Baron Van Hoevell) yang berpendapat penempatan

⁴⁹ B. J. Haga, *op. cit.*, hlm. 7.

⁵⁰ Sebuah dewan yang bertugas dalam membantu mengurus pemerintahan di dalam kerajaan. Anggotanya berasal dari *olongia-olongia* yang merupakan “tiang utama” dari kerajaan.

⁵¹ B. J. Haga, *op. cit.*, hlm. 8.

daerah-daerah Swapraja Gorontalo di bawah pemerintahan langsung sudah tidak boleh ditangguhkan lagi. J. Hayting yang merupakan pegawai tinggi juga mendesak untuk mengambil keputusan tersebut.⁵² Atas desakan tersebut, pada 6 Juli 1889 Residen Manado mengunjungi Gorontalo dan mengundang semua pejabat pribumi yang ada di sana. Bersamaan dengan itu Residen Manado membawa Surat Keputusan Pemerintah bertanggal 17 April 1889 no.9 yang memuat tentang reorganisasi di Sulawesi Utara. Dalam surat tersebut berisi tentang penghapusan Kerajaan Gorontalo, Limboto, Bone, dan Boalemo. Sebagai gantinya mereka akan diletakkan di bawah pemerintah langsung Hindia Belanda dalam satuan wilayah *Afdeeling* di bawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Gorontalo.⁵³ Sejak keputusan ini dibuat, secara resmi status Kerajaan Gorontalo beserta kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam *Limo Lo Pohalaa* dihapuskan. Pengalihan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Belanda dan menandai era pemerintahan modern yang selanjutnya akan diterapkan oleh pemerintah Belanda. Sejak tahun 1860-an dan sesudahnya, pemerintah Belanda telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki struktur pemerintahan yang serampangan dan menciptakan suatu pemerintahan pribumi yang lebih teratur untuk mengimbangi pemerintahan Belanda.⁵⁴

Tidak berselang lama setelah pembentukan *Afdeeling* Gorontalo, pada tahun 1894 Pemerintah Hindia Belanda secara resmi menetapkan Distrik Kota sebagai

⁵² B. J. Haga, *op. cit.*, hlm. 90.

⁵³ *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1889 no. 94.

⁵⁴ M. C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 195.

ibukota dari *Afdeeling* Gorontalo dimana asisten residen berkedudukan. Sejak saat itu pemerintah menganggap perlu untuk pembagian administratif baru dalam mengatur kehidupan perkotaan. langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah dengan menetapkan batas-batas Kota Gorontalo. Secara resmi menetapkan batas Kota Gorontalo berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda 25 Januari 1894 no. 16. Batas-batas kota mencakup:

- Di sebelah utara: jalan raya dari Kabila ke Gorontalo, lewat Tamalate sampai perempatan dekat masjid di jalan raya ke Potanga dan selanjutnya sampai jembatan di atas Sungai Toto;
- Di barat dari jembatan itu, aliran kiri Sungai Toto sampai bertemu di Bolango; aliran kiri Sungai Bolango sampai jembatan di depan Fort Nassau, kemudian garis lurus ditarik dari jembatan ini ke lereng gunung sebelah barat dan kemudian lereng gunung itu mengikuti arah selatan sampai titik temu dengan sebuah garis lurus, ke arah barat laut dari Batulayar menuju lereng gunung pantai;
- Di selatan: dari tempat itu, sebuah garis lurus ke arah tenggara melalui Batulayar sampai mercusuar di Tanjung Leato;
- Di timur: dari mercusuar ini sebuah garis lurus ke utara menuju aliran kiri Sungai Olidumbo, sampai jarak 100 meter dari aliran kiri Sungai Milango; aliran kiri Sungai Olidumbo sampai bermuara di Milango, kemudian garis lurus ke arah barat laut sampai titik ujung aliran kanan Bone tempat pertemuan Bolango, kemudian aliran kanan Bone ke arah hulu sampai

perpanjangan jalan Kabila; jalan ini sampai jembatan di Tamalate dan akhirnya aliran kanan sungai sampai titik awal batas utara.⁵⁵

Batas Kota Gorontalo pada masa Pemerintah Hindia Belanda dapat juga dilihat dari peta yang dibuat oleh Baron van Hoevell. Berdasarkan peta di atas dapat dilihat batas-batas dari setiap distrik dari *Onderafdeeling* Gorontalo dan *Onderafdeeling* Limboto. Garis berwarna merah menandakan batas dari distrik-distrik yang berada di bawah *Onderafdeeling* Gorontalo sedangkan garis berwarna hijau menandakan batas dari distrik-distrik yang berada di bawah *Onderafdeeling* Limboto. Wilayah Distrik Kotta pada peta di atas ditunjukkan dengan warna hijau. Pada bagian utara dibatasi oleh Distrik Tapa dan Distrik Telaga, pada bagian selatan dibatasi oleh Selat Tomini, pada bagian barat dibatasi oleh Distrik Kabila dan di bagian timur dibatasi oleh Distrik Batudaa. Tidak hanya itu, pada peta di atas juga menunjukkan lokasi setiap ibukota dari setiap distrik, persebaran kampung, jalan besar yang menghubungkan antar distrik, jalan raya, serta jalan setapak yang ada di setiap distrik.

⁵⁵ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1894, No.32.

